

# **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Andi Tenri Ellyanti Entong<sup>1</sup>, Mursalim<sup>2</sup>, Ibrahim Dani<sup>3</sup>  
(Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia)  
[andiellyanti@gmail.com](mailto:andiellyanti@gmail.com)<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

**ANDI TENRI ELLYANTI ENTONG.** The Influences of Applications Government Accounting Standard, Human Resource Competence, and The Use of Information Technology to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province (guided by **Mursalim** and **Ibrahim Dani**).

This research was conducted with the aim to: (1) the influences of applications of Government Accounting Standard to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province; (2) the influences of Human Resource Competence to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province; and (3) the influences of the use of Information Technology to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province.

This research use a scientific approach. This rsearch use 37 employees as respondents with their main duties and functionin carrying out their works.

The research result showed that: (1) the application of Government Accounting Standard had influential but not significant to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province; (2) the Human Resource Competence had influential and significant to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province; and (3) the use of Information Technology had influential but not significant to The Quality of Financial Report in Human Resource Development Agency Sulawesi Selatan Province.

**Keywords :** The Quality of Financial Report, Applications Government Accounting Standard, Human Resource Competence, The Use of Information Technology

## I. PENDAHULUAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Pemerintah Provinsi, OPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang juga disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jadi secara keseluruhan SKPD tergabung menjadi OPD. OPD dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. OPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja SKPD harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005).

Salah satu tugas dari SKPD adalah melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD yang tertuang dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang disusun setiap satu tahun anggaran dan setelah pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran setiap SKPD berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan SKPD yang saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sangat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu sendiri. Laporan Keuangan SKPD dituntut untuk memberikan penyajian yang akuntabel dan berkualitas. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan

keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevannya itu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalah atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP 71, Tahun 2010).

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Menurut Suwardjono (2005), Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi juga diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007)

Setiap tahunnya, LKPD mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas Pemerintah Daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Fenomena menunjukkan bahwa banyak Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan (Sri Mulyani, 2017). Menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD berada diatas target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2016 (IHPS II BPKRI, Tahun 2017).

Dari data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 atas 542 LKPD Kabupaten/Kota tahun 2016 menunjukkan opini WTP diberikan atas 378 (70 %) dan berdasarkan tingkat pemerintah, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 Pemerintah Provinsi (91%) termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil meraih opini WTP atas pemeriksaan keuangan tahun 2017. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk pemerintah provinsi 85 % ditahun 2019.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan saintific yang merupakan struktur teori untuk membentuk hipotesis dan kemudian menggunakan fakta atau data empiris untuk menguji hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan atau konklusif. Pendekatan saintific membutuhkan pengujian secara kuantitatif dan statistik (Jogiyanto, 2014).

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan,

adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai Agustus sampai Oktober 2018.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006 : 60).

Data primer diperoleh peneliti bersumber dari responden melalui penyebaran kuesioner penelitian. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai, penerapan SAP, kompetensi SDM, dan pemanfaatan TI terhadap laporan keuangan di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

## **III. PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian pembahasan berikut ini.

### **1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan (Y)**

Hasil pengujian telah membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syarifuddin (2015) Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan Sistem Pengendalian Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Kompetensi SDM dan Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Binjai namun Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Binjai Namun. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Irwan (2011), Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

## **2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan (Y)**

Hasil pengujian telah membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan

bahwa apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia yang diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan sumber daya manusia merupakan unsur yang menjalankan semua fungsi pelaksanaan tugas baik berupa peraturan maupun standar operasional prosedur yang diterapkan dalam suatu organisasi pemerintahan. Apabila mengacu pada teori yang dikemukakan Watson Wyatt sebagaimana yang dikutip dalam Ruky (2003), kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Kaitannya dengan teori keagenan sebagaimana yang dikemukakan Gilardi (2001) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai hubungan pendelegasian. Dalam pendelegasian tugas harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang diberikan wewenang dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia seorang pegawai (agen) maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yang akan disampaikan kepada pemberi amanah (prinsipal).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irwan (2011) yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat dimana mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, dan juga hasil penelitian Mahaputra dan Putra (2014) tentang Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengemukakan bahwa kapasitas

sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP adalah manusia (Indriasih, 2014). Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan pemanfaatan Teknologi Informasi akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008), Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014)

### **3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan**

Hasil pengujian telah membuktikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini kemungkinan dikarenakan teknologi informasi hanya sebagai alat atau media yang dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, bukan membuat kualitas laporan keuangan semakin baik. Secara teori hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang



menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hal ini sejalan dengan Penelitian Angraini dan Riduan (2014), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan namun tidak sejalan dengan penelitian Karmila, Tanjung dan Darlis (2014), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau) dimana pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **Saran**

1. Perlunya peningkatan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) agar

- kualitas laporan keuangan semakin baik.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tetap perlu menjadi perhatian agar kualitas laporan keuangan semakin baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni,D.T. dan Riduan, A. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.Vol. 3 No.3.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Semester II Tahun 2017
- Barus Syarifuddin, 2017. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah kota Binjai dengan sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D. 2009. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi* Vol 2 No 2 Juli 2009 Hall 133-151
- Indriasih,D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5, No. 20 ISSN 2222-2847
- Indriasari, desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir) *Jurnal SNA Pontianak*.
- Irwan,D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*.Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Penerbit Andi: Jogjakarta.
- Karmila. Tanjung, A. R. dan Darlis, E. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknolog ilnformasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Daerah. *Jurnal Sorot* Vol.9 No.1 Lembaga Penelitian Universitas Riau. ISSN 1907- 364 X.

Mahaputra, Rahma Upabayu I. P. dan Putra, I. W. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana 8. 2 (2014) 230-244

Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2 Jakarta : Salemba Empat

Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13, April 2008, hal 48-58

Prasetya, Gede Edy. 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Andi. Yogyakarta

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ruki. Ahmad. S. 2003. *Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.